

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PBMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA SEMARANG

2021

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/13, 7 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PBMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang pembentukan Panitia rmusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pbemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang dan memperhatikan Surat-surat Fraksi.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2021.